

BAB III

NAHDLATUL ULAMA (NU)

NU dari masa ke masa mengalami pasang surut dan perubahan. Sejak didirikan hingga tahun 1952, NU berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan. Kemudian berubah fungsi menjadi organisasi politik sejak tahun 1952 hingga 1973. Tahap selanjutnya NU berfusi ke dalam PPP. Dan pada tahun 1984 hingga sekarang, NU kembali berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan.

A. Perkembangan NU hingga Tahun 1952

Pertumbuhan NU sejak berdiri hingga tahun 1952, telah melewati tiga zaman, yakni : zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman RI.

Pada awal berdirinya, yakni 31 Januari 1926 nama dan tempat kedudukan NU secara jelas dapat dimengerti dari Qanun Asasinya :

Jam'iyah ini bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan sebagai permulaan, berkedudukan di Surabaya. Kedudukan ini dapat berpindah ke daerah wilayah Indonesia yang manapun dengan kesepakatan dan penetapan Mukhtamar Jam'iyah.

Kemudian diperjelas lagi oleh Anggaran Dasar NU tahun 1984-1989 yakni:

Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 untuk waktu tak terbatas. Jam'iyah ini berkedudukan di Ibukota Negara, yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

NU yang didirikan pada menjelang akhir masa penjajahan Belanda ini, jelas tidak dapat dipisahkan dengan

beberapa peristiwa yang melatar belakangnya. Beberapa peristiwa tersebut antara lain :

1. Berdirinya group diskusi di Surabaya yang diberi nama "Taswirul Afkar". Group ini dipimpin K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur. Sedangkan untuk kaum terpelajar didirikanlah group yang diberi nama "Islam Study Club". Kelompok diskusi tersebut, pada tahun 1926 berkembang menjadi Nahdlatul Wathon yang merupakan embrio bagi berdirinya NU.⁹⁴

Nahdlatul Wathon adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang pendidikan. Beberapa madrasah yang sudah didirikan antara lain: madrasah Khithobul Wathon di Surabaya, madrasah Ahlul Wathon di Pulo Wonokromo, madrasah Far'ul Wathon Gresik, dan madrasah Hidayatul Wathon di Jombang.⁹⁵

2. Dibentuknya KOMITE HIJAZ sebagai reaksi terhadap undangan RAJA HIJAZ tahun 1926, guna menghadiri Konggres Khilafah di Arab Saudi. Komite HIJAZ ini adalah semacam badan yang didelegir untuk menghadapi Konggres tersebut, dan mewakili para ulama tradisional di Indonesia. Anggota Komite Hijaz ini terdiri dari K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan Syeih Ahmad Ghonaim Al Amir Al Misri seorang Ulama terkenal dari Mesir yang menetap di Jawa Timur.⁹⁶

Dalam rapatnya di gedung "Onderling Belang" di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M para Ulama pendukung Komite Hajiz berkumpul untuk menerima laporan hasil-hasil komite Hijaz. Dalam pertemuan tersebut kemudian diputuskan untuk membentuk suatu organisasi (jam'iyah) yang diharapkan dapat menghimpun segenap Ulama beserta para santrinya di dalam satu wadah yang berasaskan Islam Ahlussunnah Waljamaah. Organisasi ini atas usul K.H. Alwi Abd. Aziz kemudian diberi nama "Nahdlatul Ulama" yang disingkat NU.⁹⁷

Tujuan didirikannya NU pada mulanya adalah: mengan-

jurkan berpegang teguh pada salah satu madzhab empat yaitu: Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'iy, Imam Malik' bin Anas, Imam Abu Hanifah Annu'man, Imam Ahmad bin Hambal; dan membangun sarana-sarana kemaslahatan Islamiah.⁹⁹

Sedangkan usaha-usaha yang dijalankan meliputi:

1. Mengadakan ta'aruf antar ulama yang berpegang pada salah satu madzhab empat tersebut dan memperkuat ikatan diantara mereka.
2. Meneliti kitab-kitab sebelum digunakan untuk pelajaran agar dapat diketahui apakah kitab-kitab itu termasuk Ahli Sunnah Wal Jama'ah atau dari kitab-kitab Ahli Bid'ah.
3. Menyebarkan agama Islam atas dasar madzhab tersebut disegala penjuru dengan segala cara yang baik.
4. Memperbanyak sekolah-sekolah Islam dan semacamnya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya.
5. Terjun dibidang yang ada maslahatnya untuk masjid-masjid, pondok-pondok pesantren bahkan disegala bidang yang dapat membantu meringankan beban orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, dan para fakir miskin.
6. Membentuk badan-badan bagi mendorong peningkatan perekonomian.¹⁰⁰

Keanggotaan NU pada mulanya hanya terdiri dari tiga kelompok yakni: kelompok Ulama, kelompok pembantu dengan bekerja, dan kelompok pembantu dengan harta.¹⁰⁰

Sedangkan sumber keuangannya adalah segala apa yang tidak dilarang oleh syariat yang suci.¹⁰¹

Demikianlah sedikit gambaran tentang NU. pada masa awal ketika baru didirikan.

Dalam perjalanannya tampaknya NU mengalami benturan atau perselisihan dengan organisasi lain.

Perselisihan ini seringkali merupakan akibat adanya salah paham dan kecurigaan yang berlebihan.

Adanya benturan atau perselisihan tersebut tercermin dalam pidato Rois Akbar Jam'iyah NU K.H.M. Hasyim Asy'ari:

Allah ta'ala berfirman (yang artinya):

"Wahai Nabi, Aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari".

"Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu sekalian".

Rasulullah s.a.w. telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya, sehingga mereka--dalam saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga--tak ubahnya satu jasad; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, seluruh jasad ikut merasakan demam dan tak dapat tidur.

Sayyidina Ali -Karramallahu wajhah- berkata: "Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan belakangan".

Allah s.w.t. telah berfirman: "Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah".¹⁰²

Selanjutnya penulis ingin meneruskan uraian tentang perkembangan dan perjalanan NU.

Seperti tersebut dahulu, bahwa perjalanan NU sejak berdiri hingga 1952, telah melewati tiga zaman yakni: zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang dan zaman RI.

Pada zaman Belanda, NU bergerak membina umat menurut wawasan keagamaan yang memang sesuai dengan wawasan keagamaan mayoritas kaum muslimin Indonesia.¹⁰³

Namun usaha pembinaan ini tidak mudah, sebab politik kolonial Belanda bertujuan menjajah Indonesia untuk selamanya. Untuk mencapai ambisinya itu, Belanda menerapkan taktik belah bambu, satu golongan diangkat dan golongan yang lain diinjak.¹⁰⁴

Walaupun Belanda berusaha melumpuhkan setiap usaha NU--terutama yang diwakili oleh para kiyai dan santri-santrinya--, namun usaha Belanda tidak banyak hasilnya, bahkan

sia-sia. Semakin banyak tekanan yang diberikan oleh Belanda, semakin banyak pula perlawanan menentanginya. Dengan demikian kiyai/ulama mempunyai peranan penting dalam menyelamatkan umat dari cengkeraman Belanda.¹⁰⁵

Bahkan Komite Hijaz yang merupakan embrio lahirnya NU, telah berhasil mengirimkan delegasi ke pemerintah Saudi Arabia yang terdiri dari Ketua Syeh Achmad Ghonaim al mishry dan Katib K.H. Abdul Wahab Hasbullah untuk memperjuangkan tetap terpeliharanya dan dilindunginya madzhab empat di Al-Haramain. Perjuangan tersebut ternyata berhasil dengan surat balasan dari Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman keluarga Faisal kepada Hadhrotussyaich K.H. Hasyim Asy'ary, yang inti pokoknya "apa saja yang ditentukan Qur'an, Assunnah, Imam-imam madzhab salaf dan Imam-imam madzhab empat akan diamalkan dan dibantu pelaksanaannya". Selanjutnya raja Hijaz menandakan bahwa dia akan tetap berjalan diatas jalan orang-orang salaf yang sholeh. Permulaan mereka adalah para sahabat Nabi, dan sebagai penutup adalah Iman yang empat.¹⁰⁶

Pada zaman Jepang, seluruh organisasi yang didirikan masyarakat dilarang bergerak atau dibekukan. Yang boleh bergerak hanyalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang atau yang sesuai dengan kehendak Jepang. NU termasuk yang dilarang bergerak.¹⁰⁷

Bahkan K.H. Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Beliau dituduh memelopori orang-orang yang mengadakan kerusakan di pabrik gula Cukir Jombang. Dan para santrinya akan mendapat perlakuan yang sama bila berani menentang Jepang.¹⁰⁸

Baru setelah Jepang mendekati kekalahannya, beberapa organisasi diizinkan bergerak lagi, termasuk NU, dibawah pengawasan yang sangat ketat dan keras dari Jepang. Praktis, izin bergerak itu tidak ada artinya apa-apa.¹⁰⁹

Namun yang menggembirakan adalah dibebaskannya K.H. Hasyim Asy'ari dari tahanan. Bahkan pada tahun 1944, K.H. Hasyim Asy'ari diserahi jabatan kepala kantor urusan Agama atau Sumubu menggantikan Husein Djajadiningrat.¹¹⁰

Demikianlah politik Jepang terhadap Islam di Indonesia, dimana didalamnya terdapat Jam'iyah NU. Tentu saja gambaran politik Jepang ini, hanya sebagian kecil saja.

Pada zaman kemerdekaan, yakni setelah proklamasi kemerdekaan RI, NU tetap sebagai jam'iyah, sedangkan urusan politik disalurkan melalui Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).¹¹¹

Ketika Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia, rakyat Indonesia menentang dan siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka berkumpul ulama NU Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan resolusi jihad yang isinya: "Melawan Belanda hukumnya fardlu ain, dan siapa yang gugur dalam pertempuran tersebut adalah syahid". Maka tidak heranlah jika Bung Tomo menyerukan "Allohu Akbar" dalam menggerakkan perlawanan rakyat menghadapi tentara Inggris dan Belanda di Surabaya yang terkenal dengan pertempuran 10 Nopember 1945.¹¹²

Dalam pertempuran 10 Nopember tersebut, para kiyai banyak yang terlibat secara fisik maupun batin. Dan justru yang kedua inilah yang besar pengaruhnya guna membangkitkan semangat patriotisme.¹¹³

Para kiyai tersebut bergabung dalam barisan Sabilillah yang dibentuk oleh Masyumi, dan dipimpin oleh panglima tertingginya K.H. Masykur, aktivis NU. Sedangkan untuk para pemuda, termasuk kepanduan Anshor dan para santri pondok pesantren, Masyumi membentuk barisan Hisbullah yang dipimpin Panglima Tertingginya K.H. Zainal Arifin, juga aktivis NU. Disamping itu juga dibentuk Markas Ulama Jawa Timur (MUDT) dengan pelaksana harian K.H. A. Wakhid Hasyim, yang tugasnya mengirim kiyai-kiyai untuk mendampingi Hisbullah dan Sabilillah di sektor-sektor pertempuran.¹¹⁴

Dibidang pemerintahan, NU juga selalu diikutsertakan baik sebagai menteri yang memimpin departemen atau sebagai anggota BP KNIP yang kemudian menjadi DPR, mewakili Masyumi.¹¹⁵

Setelah revolusi fisik selesai, dan perjuangan

mengisi kemerdekaan nampak lebih intensif, maka kondisi dan konstalasi politik di negeri ini berubah pula. Perbedaan pandangan terhadap beberapa masalah, perbedaan kepentingan dan perbedaan karakteristik perjuangan mendorong NU mencari posisi yang lebih tepat untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pada tahun 1952 M, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik yang mandiri, dan dimulailah babak baru bagi NU berkiprah sebagai partai politik.¹¹⁶

B. NU Memasuki Gelanggang Politik

NU berubah fungsi dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik. Partai NU berperan sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia berlangsung sejak tahun 1952-1973.

Peranan politik NU ini, dimulai sejak keluarnya NU dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik. Hal ini dituangkan dalam keputusan Mukhtar NU XIX yang berlangsung pada 20 April hingga 1 Mei 1952. Dalam Mukhtar tersebut 61 suara setuju, 9 suara menolak, 7 suara blangko.¹¹⁷

NU bukanlah organisasi yang pertama kali keluar dari Masyumi, tetapi SI-lah yang keluar terlebih dahulu dan lantas mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).¹¹⁸

Diantara sebab-sebab keluarnya NU dari Masyumi adalah dirubahnya status Majelis Syuro yang diduduki para ulama yang semula selaku Dewan Partai yang berfungsi mengadakan kontrol terhadap kebijaksanaan Pimpinan Partai, sejak 1950 dirubah hanya sebagai penasehat saja. Setelah berkali-kali NU mendesak untuk merubah Masyumi menjadi Badan Federasi tidak diindahkan dan mengingat pula keluarnya SI dari Masyumi yang menyebabkan Masyumi bukan satu-satunya wadah kesatuan ummat Islam, maka NU keluar dari Masyumi dengan tetap berpegang teguh pada kepribadiannya yang selalu mendahulukan qoidah-qoidah agama dari pada pertimbangan yang lain.¹¹⁹

NU menjadi partai politik tanpa meninggalkan urusan-urusan yang telah seperempat abad digelutinya yaitu urusan ma'arif (pendidikan), mabarrot (sosial), da'wah, muamalah dan lain-lain yang merupakan satu hal yang kurang lazim dilakukan partai politik. Partai politik pada zaman itu, harus berebut massa sebanyak-banyaknya, membentuk wadah-wadah (organisasi pendukung) bagi bermacam-macam kelompok dan profesi seperti pemuda, buruh, wanita, tani, nelayan, seniman, pejabat, olahragawan, dan lain-lain. Dengan demikian barisan NU menjadi sangat panjang dan medan perjuangannya menjadi sangat luas.¹²⁰

Pada tahun 1955 dilaksanakan Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia. Partai NU ikutserta sebagai kontestan dan hasilnya cukup mengejutkan semua orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebab NU yang baru tiga tahun menjadi partai politik dapat mengumpulkan suara yang tak terduga yaitu 6.955.215 suara. Dan NU keluar sebagai pemenang III diantara 28 kontestan peserta pemilu.¹²¹

Tabel nomor 1, akan menjelaskan komposisi perolehan masing-masing kontestan.

Tabel 1. Hasil Perolehan Kursi DPR dalam Pemilu 1955

Kontestan	Kursi
PNI	57
Masyumi	57
NU	45
PKI	39
Lain-lain	59
Total	257

Sumber: Bibit Suprpto, Nahdlatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya (Malang: LP. Ma'arif Cabang Kabupaten Malang, 1987) 68.

Konstituante hasil pemilu 1955 tidak berhasil

menyusun UUD, kabinet jatuh bangun sehingga roda pemerintahan berjalan tersendat-sendat. Berdasarkan keadaan tersebut, maka presiden Sukarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Sejak saat itu Presiden Sukarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dalam pemilu 1955 muncul sebagai kekuatan IV, berhasil mendekati Presiden Sukarno sehingga menjadi anak emasnya. Sedangkan Masyumi yang tokoh-tokohnya terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera, dibubarkan oleh pemerintah.¹²²

Bahaya komunis bertambah mengkhawatirkan lagi karena PKI tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Presiden Sukarno yang mengalir di dalam darahnya semangat anti kolonialisme dan imperialisme sebagai pembawaan pejuang kemerdekaan ambisinya meledak-ledak. Kesempatan ini dipergunakan oleh PKI untuk mendekatkan hubungan Presiden dan Pemerintah RI dengan USSR, RRC, dan negara-negara blok sosialis-komunis lainnya sehingga Indonesia tercengkeram dalam lingkaran blok sosialis-komunis. Dan sebagai puncaknya, lahirlah gagasan Presiden Sukarno yang populer dengan sebutan "Nasakom"; yakni persatuan antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Dengan demikian kemauan presiden Sukarno tidak dapat ditawar lagi, PKI harus masuk juga ke dalam kabinet.¹²³

Partai NU yang sejak lama bersama-sama partai lain telah berhasil mencegah masuknya PKI dalam pemerintahan, sekarang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Sebab apabila partai NU tidak mau ikut serta -padahal NU merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang dapat diandalkan- maka PKI akan merajalela dan kemungkinan besar PKI akan menguasai pemerintahan sepenuhnya. Sebab, PKI sangat dekat dengan Presiden Sukarno sehingga PNI-pun sebagai kekuatan nasionalis yang sudah mengukuhkan Presiden Sukarno sebagai bapak Marhaenis tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya dengan bertawakkal pada Allah, NU memutuskan ikutserta dalam

kabinet Nasakom bersama dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah langkah-langkah PKI.

Penggalangan kekuatan PKI kian hari kian menghebat, serikat buruh dikuasai dengan SOBSI, kaum tani dikuasai dengan BTI, dan guru-guru dikuasai dengan PGRI non vak sentral.¹²⁴

Menghadapi olah PKI ini, pimpinan NU melancarkan aksi tandingan dengan membentuk: Sarbumusi di kalangan buruh, Pertanu di kalangan petani, Sernemi di kalangan nelayan, Lesbumi di kalangan seniman-Budayawan, Pergunu di kalangan guru, dan Banser di kalangan penuda.¹²⁵

Dengan demikian, sekalipun pimpinan NU secara formal masuk di Kabinet Nasakom, tapi legalitas itu dalam prakteknya digunakan menentang PKI. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa seandainya pimpinan NU tidak menggunakan siasat demikian, maka kemungkinan besar PKI akan berkuasa merajalela baik ideologis maupun fisik.¹²⁶

Walaupun demikian, PKI tetap ingin berkuasa walaupun dengan jalan kekerasan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1966, PKI melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September atau kemudian dikenal dengan G-30-S/PKI. Gerakan secara militer ini dipimpin Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa yakni pasukan pengawal Presiden, dan mulai bergerak dini hari tanggal 1 Oktober 1965.¹²⁷

Enam orang perwira tinggi, seorang perwira pertama Angkatan Darat, dan seorang Brigadir Polisi -semuanya dibunuh secara kejam oleh PKI. Mereka itu ialah: Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayor Jendral R. Suprpto, Mayor Jendral Harjono Mas Tirtodarmo, Mayor Jendral Suwondo Parman, Brigadir Jendral Donal Izacus Panjaitan, Brigadir Jendral Soetojo Siswomiharjo, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, dan Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun.¹²⁸

Kekejaman PKI semakin memuncak, sehingga seorang putri kecil, juga menjadi sasaran tembakan senapan mesin. Putri itu bernama Ade Irma Suryani Nasution, gugur di pangkuan ibunya -di kediaman ayahnya Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama serangan PKI. Namun ayahnya, walaupun terluka, berhasil meloloskan diri dan sampai kini masih hidup.

Satu dua hari, orang masih meraba-raba siapa sebenarnya yang melakukan pemberontakan ini; dan pemerintahpun tidak mau mengumumkan keterlibatan PKI karena Presiden Sukarno tetap mempertahankan Ide Nasakom-nya.¹²⁹

Akan tetapi dari peristiwa di lubang buaya dan latihan kemiliteran di kawasan AURI yang diikuti seluruhnya oleh orang-orang PKI, maka jelaslah G-30-S/PKI itu adalah gerakan PKI.¹³⁰

Selanjutnya, warga NU yang dipelopori oleh Banser khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak menunggu komando lagi baik dari aparat keamanan maupun pimpinan pusat, menyerang orang-orang PKI dan menghancurkan anggauta-anggauta ormasnya. Hanya beberapa tempat di Jawa Tengah karena banyaknya oknum TNI yang menjadi pendukung G-30-S/PKI, terpaksa warga NU menunggu bantuan RPKAD dari Jakarta.¹³¹

Meski kenyataan sudah jelas, namun Presiden Sukarno tetap tidak mau menyalahkan PKI, sehingga pimpinan NU tampil kedepan menentang Bung Karno dan menuntut pembubaran PKI. Timbullah kemudian diwaktu itu polarisasi yang sangat tajam yaitu pro dan kontra Bung Karno, dimana NU memimpin kontra Bung Karno.¹³²

Pro Bung Karno diidentikkan dengan Orde Lama dan kontra Bung Karno diidentikkan dengan Orde Baru atau barisan Front pancasila.

Keadaan semakin tidak menentu, maka tampillah KAMI dan KAPPI bersama dengan kesatuan-kesatuan Front Pancasila lainnya memenuhi halaman DPRGR mengajukan tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura (tiga tuntutan rakyat) yai-

tu: pembubaran PKI, pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan penurunan harga/perbaikan ekonomi.¹³³

Akhirnya perjuangan tersebut tidak sia-sia yaitu dengan lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai titik awal berakhirnya pemerintahan Orde Lama presiden Soekarno.¹³⁴

Selama proses perjuangan Orde Baru, partai NU dengan segenap ormas-ormasnya menjadi kekuatan andalan, yang bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan aksi Front Pancasila lainnya, manunggal menjadi satu dengan ABRI yang sudah bersih. Dengan demikian hingga tahun 1968, partai NU selalu menjadi partner pemerintah yang terpercaya. Sekalipun begitu tidak ada tanda-tanda partai NU memaksakan keinginannya atau menyimpang dari konstitusi, tapi bersikap adil dan konstitusional.¹³⁵

Pada tanggal 3 Juli 1971 diselenggarakan Pemilu yang kedua di Indonesia dan yang pertama kali diadakan dibawah UUD 1945. Lebih dari 58 juta rakyat Indonesia yang berhak memilih melaksanakan hak konstitusionalnya untuk memilih wakil-wakilnya di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, DPRD I, dan DPRD II; secara langsung, bebas, dan rahasia.¹³⁶

Pemilu tersebut diikuti oleh 10 peserta, yaitu 9 partai dan 1 golongan karya. Dalam Pemilu ini partai NU memperoleh 58 kursi.¹³⁷ Dan tabel nomor 2 dapat memperjelas perolehan masing-masing kontestan.

Tabel 2. Hasil Perolehan Kursi DPR dalam Pemilu 1971

Kontestan	Kursi DPR
Partai Katolik	3
Partai Sarekat Islam Indonesia	10
Partai Nahdlatul Ulama	58
Partai Muslimin Indonesia	24
Golongan Karya	236
Partai Kristen Indonesia	7
MURBA	-
PNI	20
Partai Islam PERTI	2
Partai IPKI	-
Total	360

Sumber: Sudharmono et al., *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1981), 219.

Demikianlah, walaupun partai NU berhasil memperoleh 58 kursi, namun diperoleh dengan susah payah. Tidak sedikit warga NU yang ditahan, dipukuli, kehilangan pekerjaan, kehilangan miliknya, tanah garapannya dan ada pula yang kehilangan nyawanya. Sebab ABRI, para pejabat pemerintah, kepala desa, dan pamong desa sebagian besar memaksa rakyat agar memilih Golkar.¹³⁸

Melihat kenyataan hasil pemilu 1971 dimana pemerintah dan ABRI berhasil memenangkan GOLKAR secara mutlak dan diantara partai-partai yang ada memperoleh suara yang sedikit sekali, maka pemerintah menganjurkan untuk menyederhanakan partai-partai menjadi hanya dua partai politik dan satu Golongan Karya.¹³⁹

Menjelang sidang Umum MPR 1973, pada tanggal 5 Januari 1973 empat partai Islam yakni partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti membuat deklarasi menggabungkan kegiatan politiknya menjadi satu partai politik PPP. Dan pada 11 Ja-

nuari 1973, lima partai politik selebihnya yakni PNI, Parkindo, IPKI, Partai Khatolik, dan Murba bergabung dalam PDI.¹⁴⁰

Deklarasi yang dikeluarkan oleh empat partai Islam tersebut menegaskan bahwa segala kegiatan non politik, tetap dilaksanakan oleh organisasi masing-masing.¹⁴¹

Dengan demikian resminya sejak 5 Januari 1973, NU bukan merupakan partai politik lagi, tapi kembali berfungsi seperti sebelum 1952 yakni organisasi sosial keagamaan.¹⁴²

NU berfusi ke dalam PPP ini berlangsung sejak 1973 hingga 1984.

Sejak 1984, NU sebagai Jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kenasyarakatan manapun juga.¹⁴³

C. Era Baru Perjuangan NU

Era baru perjuangan NU, berlangsung sejak Muktamar NU yang ke 27 di Situbondo, tahun 1984 hingga sekarang.

Era baru perjuangan NU adalah suatu era, orde atau masa kembalinya NU pada jiwa dan semangat perjuangan NU ketika baru didirikan pada tahun 1926.

Jiwa dan semangat perjuangan tahun 1926 itu dirumuskan kembali, kemudian diharapkan dapat diterapkan dimasa kini dan juga dimasa depan.

Perumusan jiwa dan semangat tahun 1926 itu dituangkan kedalam: khittah, program dasar pengembangan, rekomendasi dan struktur organisasi.

1. *Khittah Nahdlatul Ulama*

Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹⁴⁴

Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal

Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, yang meliputi dasar-dasar amal keagamaan dan kemasyarakatan.¹⁴⁵

Khittah NU juga digali dari intisari perjalanan khidmahnya dari masa kemasa, yang meliputi: dasar-dasar faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan; perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan; dan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan dengan kepemimpinan ulama dalam kehidupan berbangsa.

- a. Dasar-dasar Faham Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan NU mendasarkan faham keagamaannya pada sumber ajaran Islam yakni: Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma', dan Al-Qiyas¹⁴⁶

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan pada ummat dengan susunan kalimat persis sebagaimana ditetapkan oleh Allah s.w.t., bukan hasil gubahan atau pemikiran Rasulullah sendiri. Oleh karena itu, Al-Qur'an juga disebut kalamullah yang membacanya saja sudah merupakan ibadah.¹⁴⁷

Adapun Al-Hadits adalah wahyu Allah (isi dan maksudnya berasal dari Allah) yang disampaikan pada ummat dalam wujud ucapan, tingkah laku, dan sikap atau keputusan Rasulullah s.a.w. yang semuanya diatur sendiri oleh beliau.¹⁴⁸

Sedangkan Al-Ijmak artinya kesepakatan para mujtahidin (terutama para sahabat) tentang sesuatu masalah. Kesepakatan ini pada umumnya oleh semua madzhab mu'tabar dijadikan dasar untuk menetapkan pendapat mengenai masalah lain yang berkaitan.¹⁴⁹

Al-Qiyas maksudnya mempersamakan hukum sesuatu yang secara jelas tidak ada dalil nashnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan sesuatu yang secara jelas ada dalil nashnya, karena terdapat kesamaan alasan hukum pada keduanya.¹⁵⁰

Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, NU mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan

menakai pendekatan madzhab.¹⁵¹

Pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah disini adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah s.a.w bersama para sahabatnya.¹⁵²

Sedangkan pengertian madzhab adalah pola pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist, atau pola tertentu yang dirumuskan seorang mujtahid untuk memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pola tertentu itu dijabarkan menjadi metode dan kaidah-kaidah tertentu pula. Dan dengan metode dan kaidah-kaidah ini, dilakukan istimbath yang menghasilkan kumpulan kesimpulan pendapat.¹⁵³

Dengan demikian, dan dengan memakai pendekatan madzhab, NU dapat merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dibidang aqidah, NU mengikuti faham Ahlussunnah wal jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asyary dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
- 2) Dibidang Fiqh, NU mengikuti salah satu dari madzhab empat yakni: Imam Abu Hanifah An nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal.
- 3) Dibidang tashawwuf mengikuti antara lain Imam Al Junaidi Al-Bagdadi dan Imam Al Ghazali serta Imam-imam yang lain.¹⁵⁴

Disamping itu NU juga mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada yang menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.¹⁵⁵

Demikianlah uraian tentang dasar-dasar faham keagamaan NU.

Dasar-dasar faham keagamaan itu akan menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri: tawassuth dan i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi mungkar.

Uraian ciri-ciri sikap kemasyarakatan itu adalah

sebagai berikut:

- 1) Sikap tawassuth dan i'tidal: sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim (tatharruf).
- 2) Sikap tasamuh: sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
- 3) Sikap tawazun: sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah s.w.t., berkhidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
- 4) Amar ma'ruf nahi mungkar: selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁵⁶

b. Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan

Di dalam keputusan Mutamar NU ke-27, NO.02/MNU-27/-1984, dinyatakan bahwa dasar-dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan seperti tersebut diatas akan membentuk perilaku warga NU, baik dalam tingkah laku individu maupun organisasi yang:

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- 2) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- 3) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah dan berjuang.
- 4) Menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, serta kasih mengasihi.
- 5) Meluhurkan kemuliaan moral, menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, serta bersikap dan bertindak.

- 6) Menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa dan negara.
- 7) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah s.w.t.
- 8) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- 9) Selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 10) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.
- 11) Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵⁷

Menurut Drs. Bisri Afandi MA, tingkah laku sehari-hari dibentuk oleh wawasan keagamaan. Beliau mendefinisikan bahwa wawasan keagamaan ialah pandangan yang berisi cara pemahaman dan kemudian pengamalan ajaran agama Islam. Wawasan tersebut tercernakan menjadi kepribadian yang ditampilkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari.¹⁵⁸

c. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan

NU memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan berdirinya yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

- 1) Peningkatan silaturahmi/komunikasi/interrelasi antar ulama.
- 2) Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian-/pendidikan.
- 3) Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan, dan pelayanan sosial.
- 4) Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.¹⁵⁹

Pilihan kegiatan NU berusaha melakukan perbaikan,

perubahan, dan pembaharuan masyarakat terutama dengan mendorong dan menumbuhkan swadaya masyarakat sendiri, termasuk di bidang ekonomi. Dan setiap kegiatan untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai amal ibadah berdasarkan paham keagamaan yang dianutnya.¹⁰⁰

d. Fungsi Organisasi, Kepemimpinan Ulama, dan Kehidupan Berbangsa

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, NU membentuk organisasi yang memiliki struktur tertentu. Organisasi itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.¹⁰¹

Peranan ulama di dalam mekanisme organisasi tersebut, ditampakkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. Dan tentu saja, para ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani.¹⁰²

Pengertian ulama disini, menurut K.H. Ahmad Siddiq, ialah suatu istilah yang disandang oleh orang yang memiliki ilmu agama Islam, ditambah amal dan ahlaq yang sesuai dengan ilmunya itu.¹⁰³

Istilah "kiyai" disamakan dengan istilah "ulama". Kiyai adalah gelar yang diberikan pada individu yang sudah masuk katagori ulama. Dan selanjutnya beliau menandakan:

Rasulullah s.a.w. menyebut ulama adalah pewaris Nabi. Yang dapat diwarisi oleh ulama ialah apa yang diwariskan oleh Nabi dan ini berarti: tugas yang diemban oleh Nabi, yaitu membimbing umat manusia ke jalan Allah. Katakanlah ulama mewarisi tugas kepemimpinan umat, umat muslimin dan umat manusia seluruhnya. Sekaligus juga, ulama mewarisi tiga bekal utama bagi pelaksanaan tugas kepemimpinannya, yaitu: ilmu tentang segala yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w; amal yang sesuai dengan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah s.a.w.; ahlaq sebagaimana diajarkan jugaditauladankan oleh Rasulullah s.a.w.¹⁰⁴

Sedangkan menurut M. Qoraish Shihab Ph.D., ulama ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah (fenomena alam) maupun Qur'aniyah.¹⁰⁵

Adapun mengenai hubungan NU dengan kehidupan berbangsa tercermin dalam kegiatan NU yang secara sadar ikut aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.¹⁰⁶

NU yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional Indonesia, senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah s.w.t.¹⁰⁷

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.¹⁰⁸

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi per-
NU senantiasa berusaha secara sadar untuk -
negara yang sadar akan hak dan kewas-
dan negara.¹⁰⁹

Dan NU sebagai
terikat dengan organ
kemasyarakatan manapun ju
negara yang mempunyai hak-
Undang-Undang. Didalam hal
hak-hak politiknya harus di
sehingga dapat ditumbuhkan s
dan mampu mengembangkan mek
dalam memecahkan permasalahan

2. Program Dasar Pengembangan NU

Program Dasar Pengembangan NU (PDP NU) adalah suatu rumusan pokok yang dimaksudkan sebagai dasar bagi Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting dalam merumuskan program secara terperinci; dan juga sebagai landasan dalam penyusunan Program Dasar pada masa bakti berikutnya.¹⁷¹

PDP NU ini mencakup beberapa bidang yakni: syuriah, pendidikan/ma'arif, da'wah dan penerbitan, sosial/mabarrot, perekonomian, pertanian dan nelayan, tenaga kerja, kebudayaan, kewanitaan, kepemudaan, kaderisasi, organisasi, dan pembentukan kepribadian.¹⁷²

3. Rekomendasi Nahdlatul Ulama

Setelah membuat beberapa pertimbangan seperlunya, NU mengajukan enambelas himbauan dan harapan. Himbauan itu ditujukan pada warganya sendiri, pemerintah, dan bahkan pula pada seluruh dunia Islam.

Himbauan pada warganya sendiri misalnya: NU memperingatkan agar warganya mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.¹⁷³

Himbauan pada pemerintah misalnya: NU mengharapkan agar pemerintah memberikan prioritas utama dalam menjernihkan arti "kata-kata" yang telah disalah artikan, umpamanya "diamankan" diartikan sebagai "penangkapan".¹⁷⁴

Sedangkan himbauan pada seluruh dunia Islam, misalnya: NU mengharapkan agar seluruh dunia Islam menghayati betapa pentingnya suasana damai dan persaudaraan diantara bangsa-bangsa muslim. Harapan ini terutama ditujukan pada dua negara yang sedang berperang yakni Iraq dan Iran.¹⁷⁵

Dan lain-lainnya, seperti tertera dalam keputusan Mukhtar NU ke-27 dengan nomor: 02/MNU-27/1984, tentang "Rekomendasi NU".

4. Struktur Organisasi NU

Kepengurusan NU terdiri dari Musytasyar, Syuriah, dan Tanfidziah.¹⁷⁶

Musytasyar adalah pembina, penasehat, dan pembimbing kegiatan NU.¹⁷⁷

Syuriah merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan jam'iyah NU.¹⁷⁸

Sedangkan Tanfidziah merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan NU.¹⁷⁹

Susunan organisasi NU terdiri dari: Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting.¹⁸⁰

Pengurus Besar untuk tingkat pusat, Wilayah untuk tingkat propinsi, Cabang untuk tingkat kabupaten/kotamadya, Majelis Wakil Cabang untuk tingkat kecamatan, dan Ranting untuk tingkat desa/kelurahan.¹⁸¹

Musytasyar dibentuk ditingkat pengurus besar, Wilayah dan cabang.¹⁸² Sedangkan Syuriah dan Tanfidziah dibentuk disetiap tingkat kepengurusan.

Musytasyar PB sebanyak-banyaknya 9 orang, terdiri dari Musytasyar 'Aam dan 8 Musytasyar.¹⁸³ Musytasyar pengurus Wilayah sebanyak-banyaknya 7 orang tanpa Musytasyar 'Aam.¹⁸⁴ Dan Musytasyar pengurus Cabang sebanyak-banyaknya 5 orang.¹⁸⁵

Disamping itu, NU memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari: Bagian, Lajnah, Lembaga, dan badan otonom.¹⁸⁶

Bagian adalah alat kelengkapan organisasi yang bertugas membantu pengurus harian dalam merumuskan kebijaksanaan bidang keahlian teknis tertentu, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pembentukannya ditentukan oleh pengurus NU sesuai dengan tingkatan masing-masing.¹⁸⁷

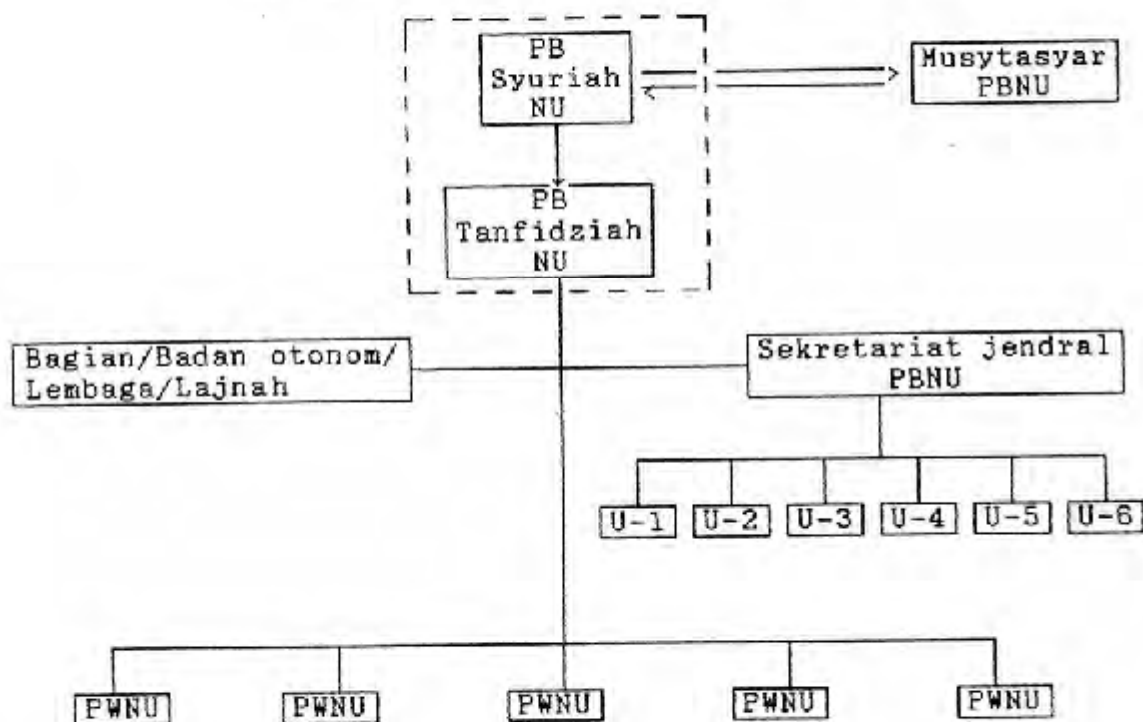
Lajnah adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program NU yang karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus. Kepengurusan lajnah di tingkat pusat ditetapkan oleh pengurus besar, sedangkan di tingkat daerah ditetapkan menurut peraturan lajnah itu sendiri.¹⁸⁸

Lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan NU, khususnya berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Kepengurusan lembaga di tingkat pusat ditetapkan oleh pengurus besar, sedangkan di tingkat daerah ditetapkan menurut peraturan lembaga yang bersangkutan.¹⁸⁹

Adapun badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijaksanaan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Kepengurusan badan otonom diatur menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.¹⁹⁰

Demikianlah sedikit uraian tentang kepengurusan NU, dan mengenai struktur organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada diagram no.1.

Diagram 1. Struktur Organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), masa bakti 1984-1989



U-1: Hukum, perundang-undangan dan penyusunan program.

U-2: Statistik, evaluasi dan penyusunan program.

U-3: Keuangan.

U-4: Umum dan kesejahteraan sosial.

U-5: Organisasi, publikasi, penggandaan, dokumentasi dan perpustakaan.

U-6: Proyek rintisan dan pengembangan.

PB = Pengurus Besar.

PW = Pengurus Wilayah.

U = Urusan.

Sumber: *Peraturan PBNU, No.22/A.11.04/IV/1985, tentang "Tata Kerja PBNU," Lampiran 7 (Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 1985).*

Mengenai susunan PBNU masa bakti 1984-1988 adalah sebagai berikut:

a. Musytasyar:

Musytasyar 'Aam: K.H.R. As'ad Syamsul Arifin.
 A'waan : K.H. Ali Ma'sum.
 : K.H. Masykur.
 : K.H. Saifuddin Zuhri.
 : K.H. Machrus Ali.
 : K.H. Anwar Musaddad.
 : H. Munasir.
 : K.H. Dr. Idham Chalid.
 : H. Imran Rosyadi, SH.

b. Syuriah

Rois 'Aam : K.H. Ahmad Siddiq.
 Wakil Rois 'Aam : K.H. Radli Soleh.
 Rois-rois : K.H.M. Najib Abdul Wahab.
 : K.H. M. Yusuf Hasyim.
 : K.H. Dr. Tolchah Mansur, SH.
 : K.H. Ali Yafie.
 : K.H. Sahal Mahfudz.
 Katib 'Aam : K.H. A. Chamid Widjaja.
 Wakil Katib 'Aam: Drs. H.A. Ghozali Masruri.
 A'waan : K.H. Ali Sibromalisi.
 : K.H. Mustamid Abbas.
 : K.H. Tubagus Amin.
 : K.H. Ahmad Ghozali.
 : Sullam Syamsun.
 : K.H. M. Hasyim Adnan.
 : H. Ahmad Fauzi.
 : H. Kun Solahuddin.
 : K.H. Anang Romly.
 : K.H. Ali Hasan.
 : K.H. Ilyas Ruhiyat.
 : Habib Syekh Al jufri.

c. Tanfidziah

Ketua : H. Abdurrahman Wahid.

Wakil ketua : H. Mahbub Djunaidi.
 Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, MPH.
 H.M. Hasyim Latif.
 Drs.H. Saiful Mudjab.
 Drs. H.M. Syah Manaf.
 Drs. H. Romas Djajaseputra.
 Sekjen : H.M. Anwar Nurris.
 Wakil sekjen : Drs. H. Asnawi Latief.
 Achmad Bagdja.
 Bendahara : Drs. H. Saiful Masjkur.
 Wakil bendahara: H.M. Said Budairy.
 Anggauta pleno : Drs. H.M. Abduh Paddare.
 Drs. H. Slamet Effendi jusuf.
 K.H. Mudjib Ridwan.
 K.H.M. Syukron Makmun BA.
 H. Harun Alrasyid.
 Drs. Mohammad Ichwan Sam.
 Drs. Sutanto Martoprasono.
 Drs. Tosari Widjaja.
 Drs. H.A. Chalik Ali.
 Drs. H.M. Zamroni.
 Ir. Mustofa Zuhad.
 Drs. H. Hasan Basri Batubara.

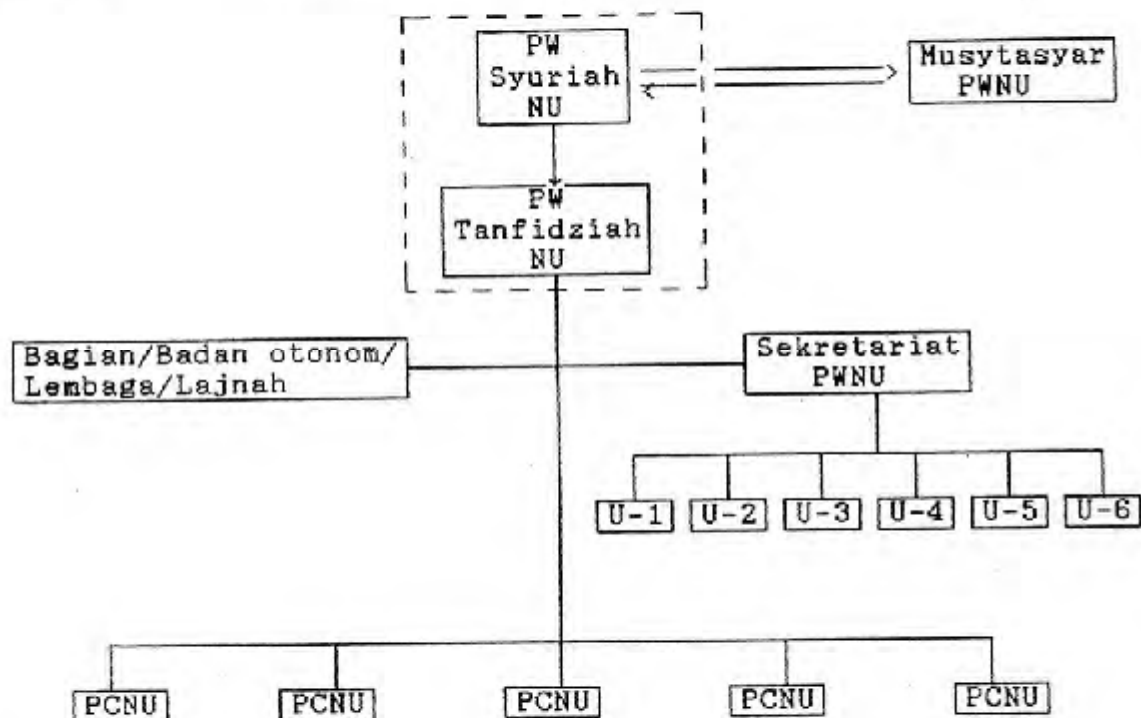
Susunan pengurus ini diambil dari laporan H. Abdurrahman Wahid, selaku PBNU, dalam laporan kegiatan setengah tahun PBNU semester Januari-Juni 1985.

Pada diagram no.1, jumlah PW dilukiskan secara simbolis. Sebenarnya, jumlah PW sama dengan jumlah daerah propinsi di Indonesia, yakni 27.¹⁰¹

Sedangkan jumlah pengurus cabang di suatu wilayah, sama dengan jumlah Daerah TK II di suatu propinsi.¹⁰²

Berikut ini diagram no.2 dan 3. melukiskan struktur organisasi pengurus wilayah dan pengurus cabang.

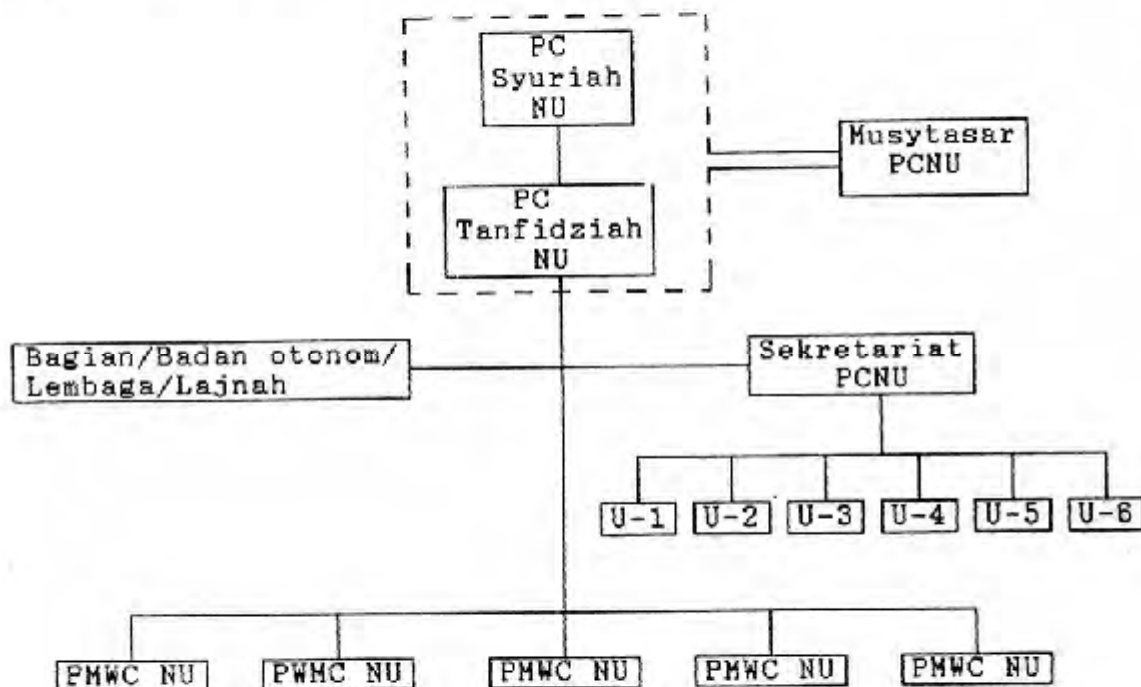
Diagram 2. Struktur organisasi PWNNU



PC = Pengurus Cabang.

Sumber: Diolah kembali dari Anggaran Rumah tangga NU 1984-1989, bab 2, pas.9, 10, 13; dan bab 3, pas.15,16.

Diagram 3. Struktur Organisasi PCNU

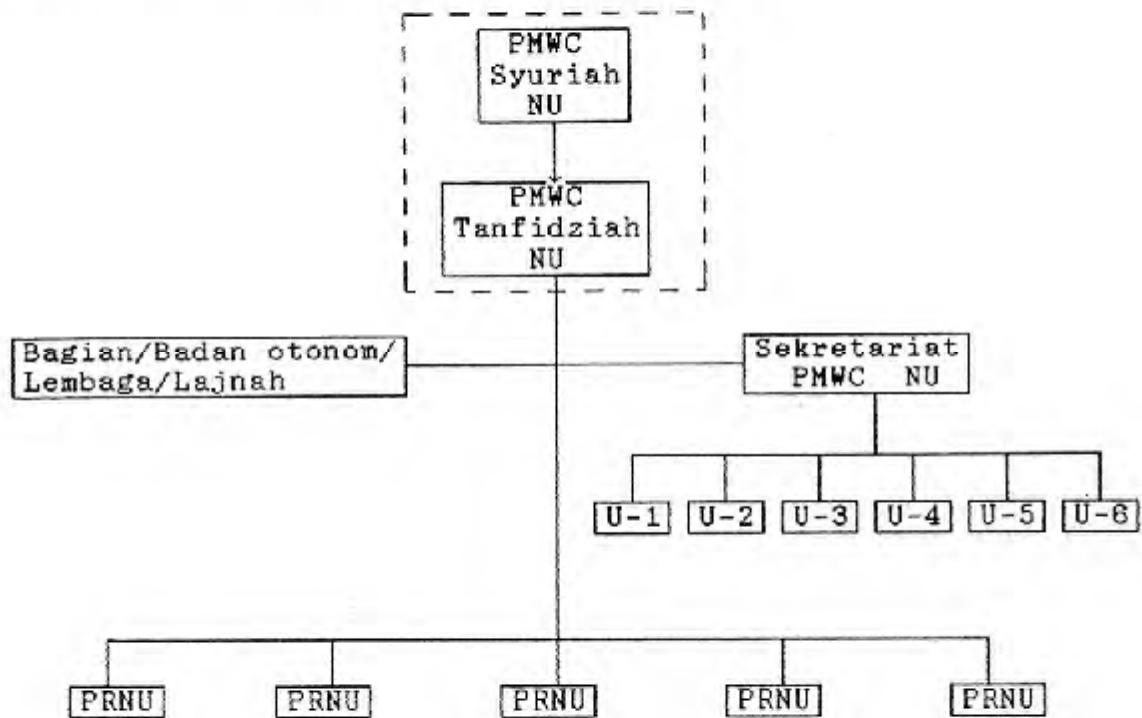


PMWC = Pengurus majelis Wakil Cabang

Sumber: Diolah kembali dari Anggaran Rumah Tangga NU 1984-1989, bab 1, pas.16, 17.

Ditingkat MWC dan Ranting, tidak terdapat Musytasyar. Diagram no.4 dan 5 berikut, akan melukiskan struktur organisasi MWC dan Ranting.

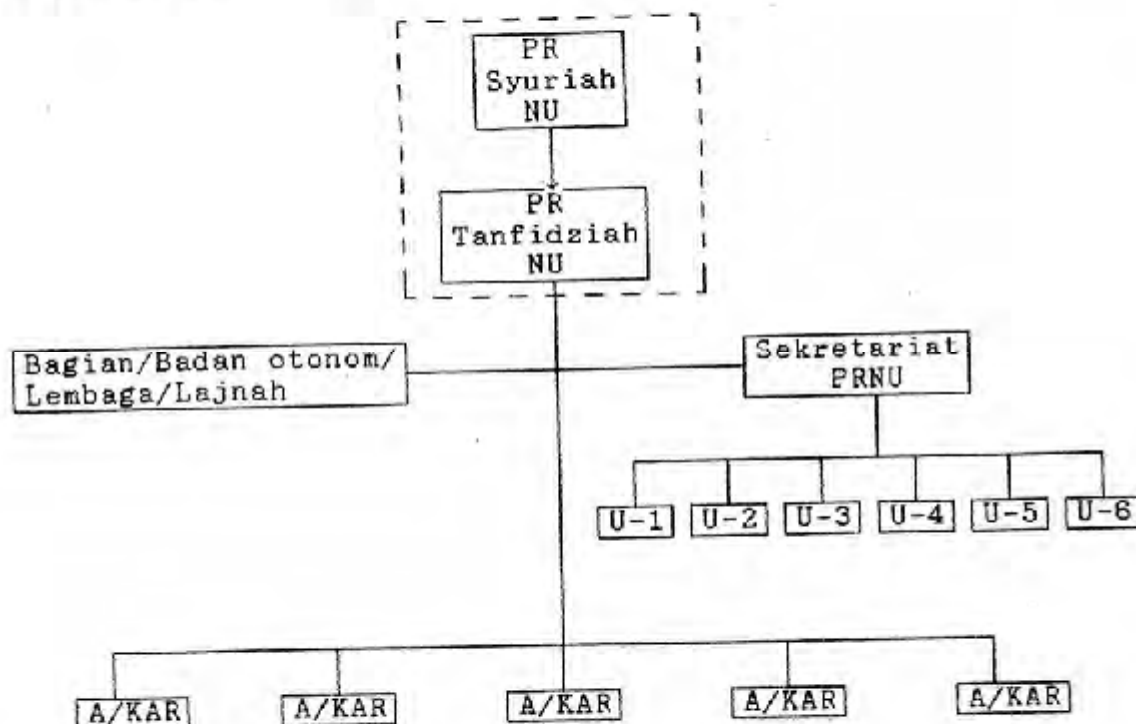
Diagram 4. Struktur organisasi PMWC NU



PR = Pengurus Ranting.

Sumber: Diolah kembali dari Anggaran Rumah Tangga NU 1984-1989, bab 2, pas.11, 12, 13; dan bab 3, pas.17, 18.

Diagram 5. struktur organisasi PRNU



A = Anggota.

KAR = Kelompok Anak Ranting.

KAR dapat dibentuk, sedikitnya terdiri dari 10 anggota dan dipimpin seorang ketua KAR. Dalam KAR tidak terdapat struktur kepengurusan. Dan dalam satu Ranting bisa terdapat beberapa KAR.

Sumber: Diolah kembali dari Anggaran Rumah Tangga NU 1984-1989, bab 1, pas.1, 2, 3, 4, 5, 6; bab 2, pas.12, 13; dan bab 3, pas.18, (Jakarta: sekretariat PBNU, 1984).

D. Rencana Pengembangan NU tahun 1984-1989

Berdasarkan Program Dasar Pengembangan NU, disusunlah Rencana Pengembangan NU periode 1984-1989.

Rencana Pengembangan itu teroermin dalam diagram No.6.